



MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



14.04

Assww...slmt siang adik2 14.04

materi kita hari ini Tindakan hukum thdp ASN 14.05

+62 813-2714-2503 ~Septianisa
Walaikumsallam, slmat siang juga ibuk 14.05

Umi Ap'19
Walaikumsalam, siang bu 14.05

+62 838-4042-5810 ~Dias Ayuningtyas
Walaikumsalam, selamat siang bu 14.05

Ibu Suci
silahkan presensi dahulu 14.05

Vety Indarwati
Walaikumussalam selamat siang buk 14.06

Jeni
Wa'alaikumsalam, siang buu 14.06

Tiwul
Walaikumusallam ibu. Selamat siang 14.06



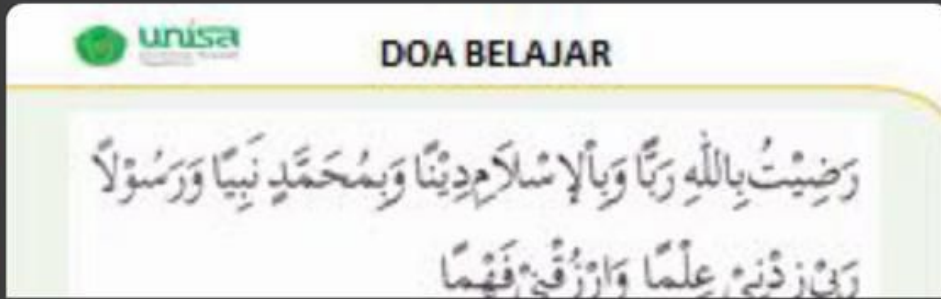


MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



IBU SUCI



ppt Tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Neg.pptx

32 halaman · 949 KB · pptx

14.09

monggo...materi dpt dibaca dahulu

14.09

Ria

Baik ibu

14.09

Ibu Suci

sy sengaja memberi ltr belakang ttg perbedaan ASN, PNS dan PPPK

14.10

serta undang2 ttg kepegawaian yg terkait

14.10

+62 858-6768-7897 ~Dwi SulistiyaniEL
lyaa buu baikk

14.10

Susi Ap 19

Walaikumsalam, baik bu

14.11

Ibu Suci

krn UUU ttg nokok? kepegawaian sdh





MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



+62 853-8956-0278 ~DinastyNH

. baik buu 14.23

Ibu Suci



0:11

14.23



Ibu Suci



2:20

14.23



Ibu Suci



2:00

14.23



Ibu Suci



3:23

14.23



Ibu Suci



0:24

14.23



Ibu Suci

Pesan ini telah dihapus. 14.23

Ibu Suci

+62 822-8589-3630 ~Marcellino

Yg gak bisa apsen gimana bu

knp ya ga bs presensi? 14.24

+62 822-8589-3630 ~Marcellino

Ibu Suci

knp ya ga bs presensi?



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



Terkait dg hal ini perlu keberanian KASN dan Kepala Daerah dalam mengambil tindakan. Termasuk aparat hukum di daerah (Polres)..jangan karena kenal...terus sungkan bertindak

15.28

Eli Kardilla_1911001025

Ingin bertanya bu, di dalam penerimaan ASN untuk menjabat di dalam kantor daerah apakah ada ketentuan kuota berapa jumlah asn perempuan dan laki-laki yang diterima untuk masuk atau semuanya tergantung dari hasil tes cpns? Jika jumlah kuotanya nya ada berdasarkan gender kira-kira apakah sama jumlahnya atau berbeda?

15.33 ✓

+62 858-6768-7897

~Dwi SulistiyaniEL

Ibu Suci

Terkait dg hal ini perlu keberanian KASN dan Kepala Daerah dalam mengambil tindakan. Termasuk aparat hukum di daerah (Polres)..jang...

Iya ibu berarti KASN dan Kepala Daerah harus bertindak secara tegas dalam melakukan penegakan ya bu?
Terimakasih ya bu

15.34

Ibu Suci

**Ibu Suci****Anda**

Eli Kardilla_1911001025

Ingin bertanya bu, di dalam penerimaan ASN untuk menjabat di dalam kantor daerah apakah a...

ada kuotanya..

kuota yg menentukan pusat (kemenpan dan RB)

15.36

ttg brp hrs jumlah perempuan dan brp laki2...tdk ada ketentuan

15.37

namun ..suatu daerah perlu kebijakan adanya afirmasi terhadap perempuan. Agar ada keterwakilan perempuan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif

15.38

kalau di tempat saya, Kab Sleman, ada perhatian ke perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di jabatan eksekutif cukup banyak...

15.40

Ibu Suci**Ibu Suci**

ada kuotanya..

kuota yg menentukan pusat (kemenpan dan RB)

maksud saya utk jumlahnya ada kuota.

Namun ada usulan ndari daerah ke

Kemennan RB. Kntusan brp jumlah kuota





MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



dalam berlahta di jabatan Gubernur atau
Walikota Periode 2?

15.47

Ibu Suci



2:56

15.49



Ibu Suci



1:47

15.49



Ibu Suci



0:55

15.49



Ibu Suci



0:33

15.49



Ibu Suci



2:15

15.49



monggo...kita lanjutkan materinya
nggih...

15.49

Ibu Suci



0:34

15.51



Ibu Suci



0:18

15.51



Ibu Suci



2:16

15.51



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...

**Ibu Suci**

adik-adik...coba...googling bagaimana akses hukum ketika ASN "ikut" bermain politik

16.40

kapan atau bilamana ASN banyak terjebak dalam tarik menarik politik dan kemudian menjadi tidak netral ? dan juga berdampak pada hukum? bisakah adik2 beri contohnya?

16.43

Di luar masalah politik yang bs menjerat ASN terpeleset masalah hukum adalah karena pelanggaran Korupsi di 8 Area atau bidang, diantaranya Pengadaan Barang dan Jasa; Manajemen ASN (jual beli jabatan) atau rekrutmen ASN, PPPK; Manajemen Aset dll.

16.48

Utk masalah "salah membuat kebijakan sebertulnya ASN dilindungi melalui UU no 30 tahun 2015 ttg Administrasi Pemerintahan. Khususnya pd pasal 28.

16.49

Ibu Suci

kapan atau bilamana ASN banyak terjebak dalam tarik menarik politik dan kemudian menjadi tidak netral ? dan juga berdampak pada hukum? bis



Kalau dari yang saya baca jika asn



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...

**Ibu Suci**

kapan atau bilamana ASN banyak terjebak dalam tarik menarik politik dan kemudian menjadi tidak netral ? dan juga berdampak pada hukum? bisak...

Kalau dari yang saya baca jika asn terlibat kedalam praktik politik sering terjadi pada saat pemilu maka dari itu sering pula terdapat kasus ketidaknetralan ASN dan itu akan menciderai kenetralan di dalam politik dan hukum itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu contoh jika asn terjebak dalam tarik menarik praktik politik nantinya akan terjadi ketidakstabilan kepegawaian dan bisa saja ASN dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh sebab itula dampak tidak netralnya asn itu tidak hanya berdampak pada politik saja tp juga pada hukum dan sosial.

16.

**Ibu Suci**

kapan atau bilamana ASN banyak terjebak dalam





MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...



terjadi politisasi birokrasi

16.50 ✓

+62 896-7435-7102 ~Intan Ayu Puspita D...**Ibu Suci**

kapan atau bilamana ASN banyak terjebak dalam tarik menarik politik dan kemudian menjadi tidak netral ? dan juga berdampak pada hukum? bisak...

Ijin menjawab bu,

Salah satu dampak dari Ketidaknetralan PNS adalah meningkatnya intervensi politik dalam manajemen PNS. Dengan adanya Intervensi politik dalam manajemen kepegawaian, akan menyebabkan proses pengadaan, penempatan dan promosi pegawai tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan kinerja, dan yang lebih parah lagi Politisasi birokrasi menghambat upaya peningkatan kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Mohon maaf apabila kurang tepat. Mungkin teman2 ada yang mau menambahkan

16.51

+62 822-8589-3630 ~Marcellino**Ibu Suci**

Foto



Tetep oak mau

16.52



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...

**Ibu Suci**

Utk masalah "salah membuat kebijakan
sebertulnya ASN dilindungi melalui UU no 30
tahun 2015 ttg Administrasi Pemerintahan. Khus...

bbrp tahun yl ketika saya ketemu KPK
dan mrk memberikan sosialisasi ttg UU
30 tsb dan saya tanyakan kpd mrk kasus
Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yg
merasa menjadi Korban Politik karena dia
merasa dia sudah membuat keputusan
yg proper saat itu...namun kok tetpa
dihukum.

16.55

Jawab KPK...UU 30/2015 melindungi
kebijakan afirmasi kebijakan. Sepanjang
tidak ada indikasi kerugian negara
maupun indikasi memperkaya diri sendiri

16.58

keren jawabannya adik-adik

16.58

jadi semula masalahnya adalah politik
namun bergeser ke hukum

16.58

kekuatan birokrasi itu luar biasa lho

16.59

karena mereka mempunyai akses ke
aset, dana dan juga mempunyai
kewenangan yang legal untuk
menggerakkan banyak hal



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine...

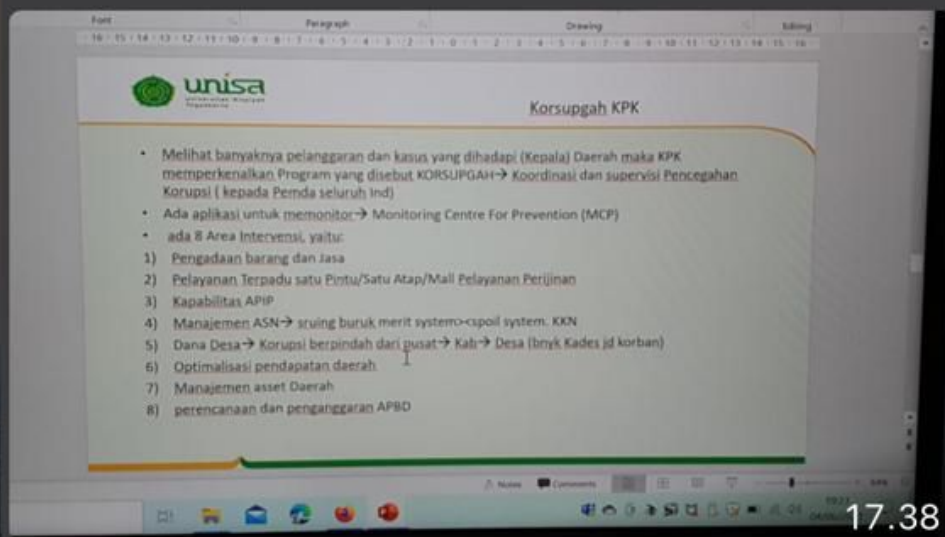


kegiatan yang mengarah kepada Keterpilihan terhadap Pasangan Calon pejabat (paslon)

17.17

Ibu Suci

17.33

Ibu Suci

17.38

ini adalah 8 area atau bidang yg bisa menjadi lahan korupsi ASN

17.38

oh krn itu...ke-8 bidang tsb menjadi perhatian khusus KPK dan merrka membentuk App utk monitoring 8 area serta membentuk satgas Kobsurgah

17.40

ulangi Korsupgah ..koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi

17.41

